

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi NTB

1. Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak antara 115'45 - 119°10 BT dan antara 8°5 - 9°5 LS. Wilayahnya di utara berbatasan dengan Laut Jawa, di selatan dengan Samudera Hindia, di timur dengan Selat Sepadan di barat dengan Selat Lombok. Luas wilayah keseluruhan adalah 49.32,19 Km² yang terdiri atas daratan 20.152,15 Km² dan lautan 29.159,04 Km². Dua buah pulau besar yaitu Pulau Lombok dengan luas wilayah daratan 4.738,70 Km² (23,51%) dan Pulau Sumbawa 15.414,37 Km² (76,49%). Selain itu juga dikelilingi ratusan pulau kecil. Pulau-pulau kecil tersebut diantaranya Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Pulau Moyo, Pulau Bungin, Pulau Satonda, Pulau Kaung, dan Pulau Panjang. Panjang Pulau Lombok dari barat ke timur sekitar 80 km sedangkan Pulau Sumbawa dari barat ke timur sepanjang 300 km dan dari utara ke selatan sekitar 100 km.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena: Terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh-Kupang yang secara ekonomis cukup menguntungkan. Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis yang semakin ramai dari arah Timur

Tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Merupakan lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya Makasar). Terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal: Bali-Komodo-Tanah Toraja.

Secara administratif NTB beribukota di Kota Mataram dan terdiri atas 10(Sepuluh) Kabupaten/Kota. Lima di Pulau Lombok yaitu: Kota Mataram dengan luas wilayah 56,35 km atau 0,28% , Kabupaten Lombok Barat luasnya 872,90 Km² atau 8,18% , Kabupaten Lombok Tengah luasnya 1.427,65 Km² atau 7,08% , Lombok Timur seluas 1.605,55 Km² atau 7,97% dan Kabupaten Lombok Utara seluas 776,25 Km² untuk Kabupaten lainnya di Pulau Sumbawa yaitu Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah 6.643,98 Km² atau 32,97%, Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas wilayah 1.849,02 Km² atau 9,17% , Kabupaten Dompu dengan luas wilayah 2.324,60 atau 11,53%, Kabupaten Bima dengan luas wilayah 4.389,40 Km² atau 21,78% dan Kota Bima dengan luas wilayah 207,50 Km² atau 1,03%.

2. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara Administratif, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi 8 Kabupaten dan 2 Kota. Berikut ini adalah daftar 8 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta Ibukota dan Luas wilayahnya.

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten
Provinsi NTB

Kabupaten/Kota Adm.	Luas (km²)	Ibu Kota
Kabupaten Bima	3.405,63 km ²	Woha
Kabupaten Dompu	2.391,54 km ²	Dompu
Kabupaten Lombok Barat	896,56 km ²	Gerung
Kabupaten Lombok Tengah	1.095,03 km ²	Praya
Kabupaten Lombok Timur	1.230,76 km ²	Selong
Kabupaten Lombok Utara	776,25 km ²	Tanjung
Kabupaten Sumbawa	6.643,98 km ²	Sumbawa Besar
Kabupaten Sumbawa Barat	1.849,02 km ²	Taliwang
Kota Bima	222,25 km ²	Bima
Kota Mataram	61,3 km ²	Mataram

Sumber : BPS Provinsi NTB

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Provinsi NTB tahun 2014 sekitar 3,68 jiwa. Kabupaten yang memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga tertinggi adalah kabupaten Dompu dengan nilai sekitar 4,11 jiwa sedangkan rata-rata terendah berada di kabupaten Lombok Tengah dengan nilai sekitar 3,35 jiwa.

Tabel 4.2.
Anggota Rumah Tangga
Provinsi NTB

Kabupaten/Kota Adm	Rata-rata Anggota Rumah tangga
Lombok Barat	3,55
Lombok Tengah	3,35
Lombok Timur	3,41
Sumbawa	3,84
Dompu	4,11
Bima	3,98
Sumbawa Barat	3,93
Lombok Utara	3,60
Kota Mataram	3,66
Kota Bima	4,01
Jumlah/rata-rata	3,68

Sumber : BPS Provinsi NTB

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

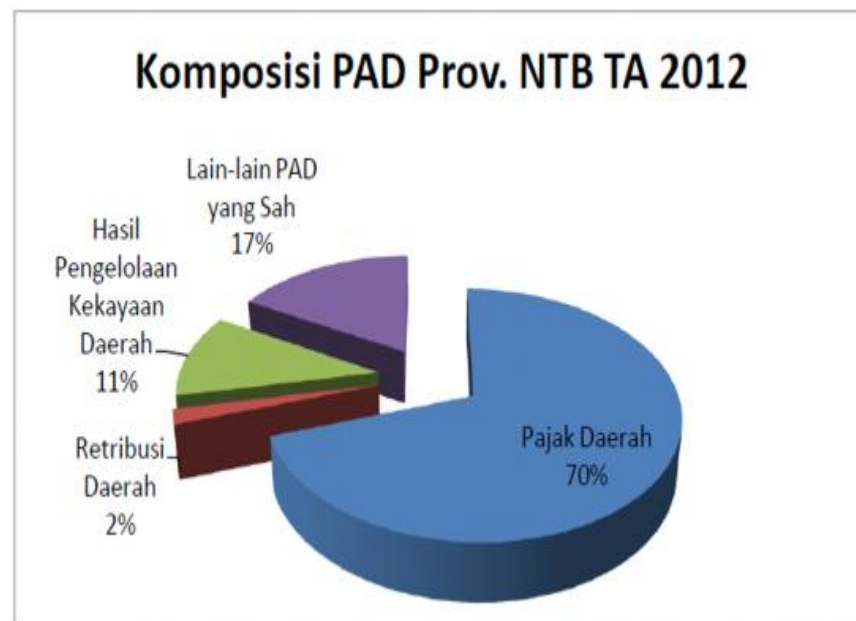
Pajak Daerah menjadi sumber utama dari PAD Provinsi NTB.

Pada TA 2012, target pajak daerah yang dihasilkan sebesar Rp 555,2 miliar atau 69,95% dari total PAD. Sedangkan Retribusi Daerah merupakan sumber PAD dengan sumbangan terkecil, yaitu 1,96% atau

sekitar Rp 15,6 miliar. Sisanya, bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, masing-masing sebesar 11,20% dan 16,89%.

GAMBAR 4.1

PAD Prov.NTB



Sumber : BPS Provinsi NTB

2. Dana Perimbangan

Transfer Pusat

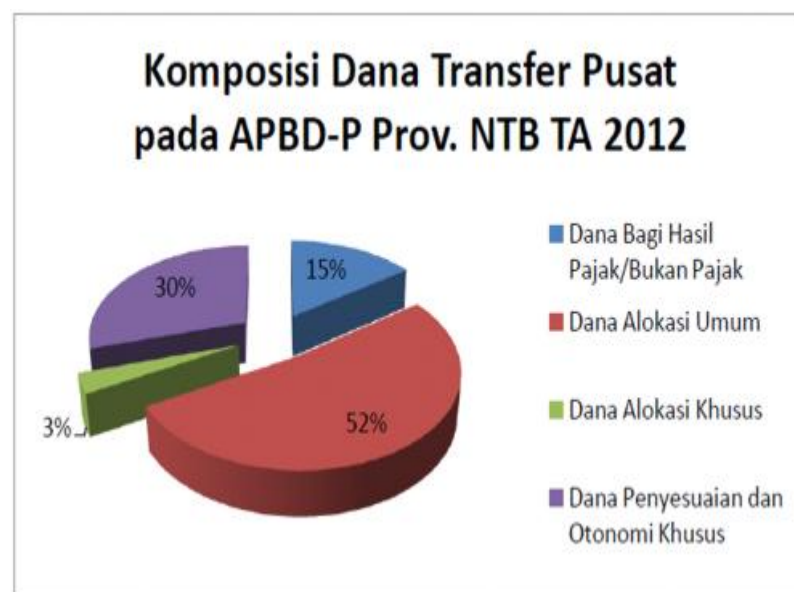
Secara kumulatif total dana transfer pusat masih sangat besar, yaitu 66% dari total Pendapatan atau sekitar Rp 1.56 triliun.

Transfer Pusat kepada Provinsi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Lebih dari setengah dana transfer pusat tersebut berasal dari DAU, yaitu

sebesar Rp 809,7 miliar (51,85%). Selanjutnya diikuti Dana Penyesuaian dan Otsus sekitar 29,58%, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 15,16%, dan yang terkecil bersumber dari DAK 3,42% dari total dana transfer pusat.

GAMBAR 4.2

APBD Prov.NTB



Sumber : BPS Provinsi NTB

Berdasarkan data informasi transfer ke daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa per 30 September 2012, realisasi Dana Transfer dari Pusat ke Provinsi NTB sebesar Rp 1,04 triliun dari total pagu Rp 1,49 triliun.

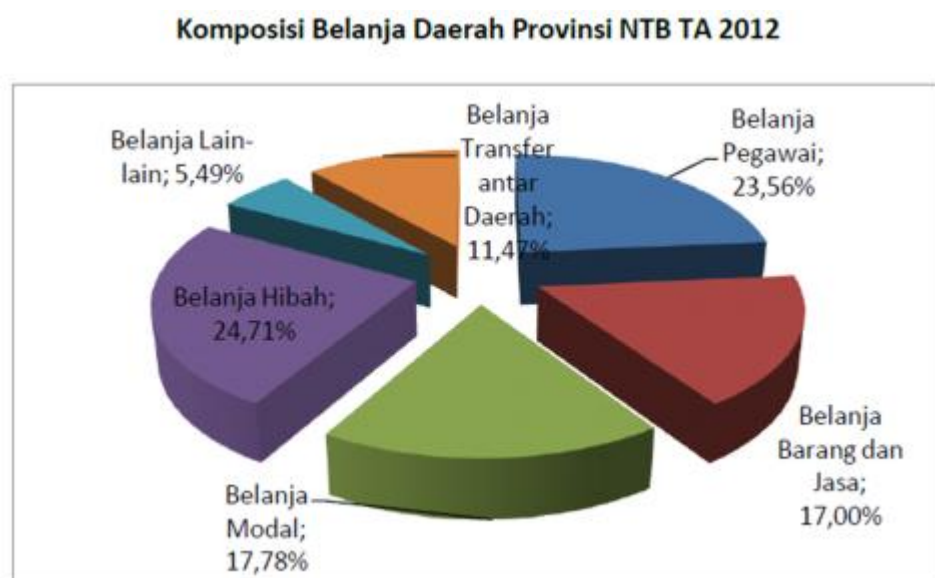
Lain-lain Pendapatan Daerah

Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah hanya bersumber dari Dana Hibah sebesar Rp 15,2 miliar.

3. Belanja Langsung

Total belanja Daerah Prov NTB TA 2012 yang dianggarkan pada APBD-P sebesar Rp 2,364 triliun. Sekitar 61,87% dari total Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tak Langsung, sedangkan selebihnya untuk Belanja Langsung sebesar Rp 901,5 miliar. Dari total Belanja daerah tersebut, terbanyak dialokasikan untuk Belanja Hibah dan Belanja Pegawai, masing-masing 24,71% (Rp 584 miliar) dan 23,56% (Rp 557,1 miliar). Sebagian lagi terbagi untuk Belanja Modal (17,78%), Belanja Barang dan Jasa (17%), Belanja Transfer antar Daerah (11,47%), dan Belanja Lain-lain (5,49%).

GAMBAR 4.3



Sumber : BPS Provinsi NTB

Meskipun nilai Belanja Lain-lain dalam komposisi Belanja Daerah paling kecil, tapi pada APBD-P TA 2012 ini; beberapa jenis belanja

yang dikategorikan Belanja Lain-lain dalam uraian ini, antara lain Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mengalami peningkatan signifikan sebesar 23,72% dari jumlah semula sebesar Rp 93 miliar dan Belanja Tidak Terduga meningkat hampir setengahnya, yaitu Rp 4,5 miliar sehingga berubah menjadi Rp 14,5 miliar. Peningkatan jumlah belanja Bansos disebabkan oleh pergeseran dari Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebesar Rp 19 miliar lebih ke Biro Keuangan. Sedangkan penambahan pada Belanja Tidak Terduga disebabkan oleh jumlah dana Tidak terduga hanya bersisa Rp 3 miliar.